

INTERVENSI KEMANUSIAAN DARI AMNESTY INTERNATIONAL TERHADAP ISU DISKRIMINASI HAM UNTUK *FIRST NATION* DI KANADA PASCA 2016

Sandiwan Putra Bintang Anugrah

UIN Jakarta, Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

sandiwanpba5@gmail.com

ABSTRACT

My research examines Amnesty International's intervention in the issue of discrimination against First Nations in Canada. The discussion is written in a descriptive, argumentative, and analytical manner using qualitative research methods with secondary data. The results of the study show that Amnesty's efforts have not been successful in resolving this issue. Using the English School Theory, which focuses on pluralism and solidarism, this theory finds the reason for the obstacles to Amnesty's dialogue with the Canadian government regarding indigenous rights violations to be the different framing of First Nation issues. Amnesty's strategy consists of three approaches: first, publishing research, petitions, and posters with the assistance of other mass media; second, correspondence with the government; and third, collaboration with activist organisations.

Keywords: *Indigenous Rights, Amnesty International, First Nations.*

ABSTRAK

Penelitian saya mengkaji tentang intervensi dari *Amnesty International* terhadap isu diskriminasi *First Nation* di Kanada. Pembahasan ditulis secara deskriptif, argumentatif, analitis memakai metode penelitian kualitatif yang datanya bersifat sekunder. Hasil penelitiannya adalah upaya Amnesty belum berhasil menuntaskan isu ini, dengan menggunakan *English School Theory* yang berfokus pada aliran pluralisme dan solidarisme, teori ini menemukan alasan hambatan dialog permohonan Amnesty ke Pemerintah Kanada terhadap pelanggaran hak adat karena perbedaan *framing* isu *First Nation*. Strategi Amnesty ada tiga cara, pertama publikasi penelitian, petisi dan poster dengan bantuan media massa lain, kedua korespondensi kepada pemerintah, ketiga kolaborasi dengan lembaga aktivis.

Kata kunci: Hak Adat, *Amnesty International*, *First Nation*.

A. PENDAHULUAN

1. Pernyataan Masalah

Pemenuhan hak-hak dasar manusia diatur dalam Deklarasi Universal Hak (DUHAM), Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Hak Perempuan (CEDAW). Kanada telah meratifikasi seluruh perjanjian HAM, namun pada faktanya itu tidak menjamin bahwa seluruh masyarakatnya akan mendapatkan hak yang sama. Diskriminasi HAM dialami oleh masyarakat adat *first nation*. Sebagai dasar pembelaan hak adat, Perserikatan bangsa bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang melampirkan kewenangan suku adat dalam proyek di wilayah mereka (FPIC). Pada 2016, Pemerintah Kanada berjanji akan mengimplementasikan UNDRIP dan menyelesaikan kelangkaan air bersih terhadap *First Nation*. (Amnesty International 2024)

2. Latar Belakang

Implementasi Kanada dari berbagai perjanjian HAM dan UNDRIP harus diawasi oleh aktor non-state sebagai representasi masyarakat. *Amnesty International* adalah *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang melakukan pengawasan, bantuan terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia dan menuliskan hasil penelitian serta pengamatannya dalam laporan tahunan secara berkala. Laporan tersebut kemudian menjadi acuan langkah advokasi selanjutnya. Pada tahun 2016, pelanggaran hak adat di Kanada yang ditemukan oleh *Amnesty* meliputi krisis air bersih, dampak perubahan iklim terhadap pasokan makanan, kekerasan terhadap perempuan adat, diskriminasi layanan pendidikan dan kesehatan. (Global News Canada 2021)

3. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Pertama kekurangan kebijakan pemerintah, Mitchell dan Tockman menjelaskan pemerintah memberikan hak otonomi kepada masyarakat adat, namun hak ini dianggap mengurangi efektifitas pembangunan sehingga faktanya bahwa setelah meratifikasi UNDRIP ternyata pemerintah masih melakukan tindakan kotor (tidak berdialog dengan kelompok adat) demi proyek ekstraksi sumber daya alam (Tockman 2018). Kedua keterbatasan implementasi UNDRIP di negara dunia ketiga, Mitchell dan Matthew menemukan interpretasi yang berbeda pada pemerintah dan masyarakat adat, meskipun hak otonomi didapatkan oleh masyarakat adat, tapi hak ini masih berupa norma belum hukum yang mengikat (Mitchell and Yuzdepski 2019). Ketiga penggunaan model kepatuhan rekonsiliasi (CMR) dalam penyelesaian konflik, Nagy menyarankan solusi ketaatan terhadap hak asasi manusia melalui tekanan rekonsiliasi transnasional seperti pengawasan, laporan dan petisi (Nagy 2017). Penelitian sebelumnya memiliki celah yang belum dibahas pada dinamika relasi konflik antara kelompok adat *First Nation* dengan Pemerintah Kanada dari sudut pandang *Amnesty International* sebagai aktor *non-state* dan INGO transnasional, sehingga penulis tertarik untuk meneliti topik ini dengan kacamata analisis *English School Theory*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis deskriptif dan analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data bersifat sekunder, diperoleh dari artikel, jurnal, laporan riset dan sumber data resmi yang dipublikasi dalam situs www.amnesty.org, situs resmi Pemerintah Kanada, ensiklopedia, dan berbagai media kredibel lainnya. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola, tren serta sudut pandang berbagai aktor, peneliti mengeksplorasi suatu kasus dalam waktu dan kelompok/ institusi tertentu menggunakan data yang diperoleh untuk mengaitkan data empiris dengan teori yang digunakan.

C. PEMBAHASAN

1. Peran *Amnesty International* dalam Diskriminasi Hak Masyarakat First Nation

Peran Amnesty dapat dikaji menggunakan konsep enam peran menurut Winfield (Winfield 2014). Peran pertama sebagai pencipta pengetahuan. Amnesty kerap turun ke lapangan untuk mengobservasi suatu isu kemudian mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk laporan di ke publik. Dalam kasus pelanggaran perempuan adat, Amnesty menulis laporan pada 2016 yang menginformasikan kegagalan pemerintah dalam mengontrol pembangunan sumber daya yang berdampak kekerasan terhadap perempuan, laporan ini berjudul "*Canada: Rampant resource development puts Indigenous women and girls at higher risk of violence*". Kedua yaitu diseminasi informasi artinya menjelaskan dengan bahasa

yang dapat dimengerti oleh publik, pemerintah supaya dapat dijadikan bahan rujukan pembuatan kebijakan. Ketiga yaitu memperkenalkan dan menekan penerapan kebijakan atau solusi berbasis aturan HAM. Ketiga peran ini saling berkaitan, secara keseluruhan Amnesty mempublikasikan hasil temuannya dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian untuk menarik perhatian pemerintah, mereka membingkai isu melalui kampanye dan petisi sehingga dapat diadopsi kedalam kebijakan.

Peran keempat yaitu memberikan wejangan dan ikut terlibat dalam acara terbuka. Dalam penyelenggaraan acara, *Amnesty* biasanya menyelenggarakan diversifikasi acara untuk meningkatkan pemahaman publik melalui seminar, menulis surat bersama, menonton film, acara biasanya akan diposting di website resmi yaitu <https://amnesty.ca/what-you-can-do/events> . Peran kelima sebagai penyedia layanan. Peran keenam sebagai pengawas independen. Dari dua peran ini, *Amnesty* dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya seperti alat, jaringan internet, bahkan penelitiannya untuk berkolaborasi dengan lembaga lain dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

2. Hak Asasi Manusia dan Hak Adat yang Dilanggar Pemerintah Kanada Menurut Laporan Tahunan *Amnesty International*

Perilaku abusif terhadap perempuan adat *First Nation* melanggar HAM. Kasus ini sampai menimbulkan korban jiwa yang dibunuh sampai jasadnya tidak ditemukan, *Royal Canadian Mounted Police (RCMP)*. Sebagai otoritas yang seharusnya menerima laporan, namun mereka justru menjadi pelakunya dan mengabaikan laporan dan dugaan yang dilontarkan kepada polisi. (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada 2013)

Masyarakat *first nation* tidak mendapatkan hak mengelola air untuk kepentingan adatnya atau generasi selanjutnya serta menentukan penggunaan wilayah air, hal ini dicantumkan dalam pasal 32 dan pasal 25 dari UNDRIP. Dengan tidak diberikannya hak ini kepada mereka, maka pemerintah juga otomatis melanggar hak lainnya, non diskriminasi/ sanitasi yaitu kewajiban untuk memberikan hak tanpa ada yang termarginalkan. (Safe Drinking Water Foundation 2019)

Air bersih adalah salah satu indikator suatu individu memiliki standar yang layak untuk hidup sehat, dikarenakan pemerintah membangun proyek tanpa izin adat di wilayah mereka dan menyebabkan kondisi perairan tercemar oleh limbah, wilayah terkontaminasi tidak dapat dihuni dan hasil pertanian serta air disana tidak layak dikonsumsi, maka selain harus mencari sumber air lain, masyarakat adat juga harus mencari hunian yang terhindar dari limbah. Ketika sudah tidak ada tanah yang tersisa sementara populasi menambah, ini menyebabkan kepadatan penduduk. Pemerintah telah melanggar hak atas kesehatan dan tempat tinggal sesuai dengan pasal 25 DUHAM. (The Canadian Encyclopedia 2023)

Indikator	Masyarakat Adat First Nation	Non Masyarakat Adat
Total keluarga yang berpenghasilan lebih dari 10,000 dollar us per tahun	7.1 %	4.7 %
Total keluarga yang berpenghasilan lebih dari 20,000 dollar us per tahun	18.3 %	9.9 %
Median total penghasilan tahunan per keluarga	52.581 dollar us	61.072 dollar

Total individu dengan penghasilan rendah setelah dipotong pajak	25.3 %	14.9 %
Total anak < 6 tahun, hidup dalam keluarga miskin	35 %	18.1 %

(Sumber: *Statistics Canada 2013a/2013b dalam Wien, 2017*)

3. Dampak Pembelaan dan Tekanan dari *Amnesty International*

Pada tahun 2016, rekomendasi kebijakan dari *Amnesty International* mendorong pemerintah Kanada membentuk Badan Nasional Pencarian Korban Perempuan Hilang dan Pembunuhan (NI-MMIWG), outputnya adalah laporan akhir dari sumber data keluarga korban, saksi mata lainnya. Dalam [situs resmi Amnesty](#), setelah membuat petisi dan terkumpul 50.000 suara, Pemerintah Kanada berkomitmen bergabung ke *Optional Convention Against Torture* (OPCAT), momen ini telah ditunggu masyarakat *First Nation* sejak 2006 karena pemerintah berjanji saat itu kemudian diundur 2009 dan diundur lagi 2013, hal ini membuktikan *Amnesty* mampu menekan keseriusan pemerintah dalam memenuhi janjinya. OPCAT adalah Konvensi yang jadi salah satu acuan penegakan HAM Perempuan Adat di Kanada. (The Feminist Northern Network 2016)

Pada 2017, *Amnesty* membuat laporan berjudul "[Glass Half Empty?](#)", 156 ahli air bersih juga ikut serta dalam penelitian ini. Setelah itu pemerintah melakukan transparansi dalam proses kerja melalui situs resmi pemerintah, "*Indigenous Services Canada*". Perubahan kebijakan terjadi karena ada peningkatan kesadaran publik. Dalam menjalankan kebijakan, harus ada lembaga independen seperti *amnesty* untuk pendampingan dan penguatan HAM.

4. Keterbatasan *Amnesty International* dalam Menjalankan Tugas

Kanada sebagai negara yang sudah menandatangani UNDRIP di tahun 2016 baru mengimplementasikan UNDRIP ke hukum nasionalnya pada 2021 untuk pengesahan dan 2023 mulai resmi diterapkannya hukum ini. Upaya dari pemerintah Kanada terkait konsultasi dengan adat sebelum pembangunan proyek di wilayah mereka tidak dilakukan dengan baik, faktor sistem pemerintahan federal juga berpengaruh disini, sikap inkonsistensi muncul ketika sampai ke lingkup provinsi dan daerah, koordinasi birokrasi sangat lambat dan berbelit. (Department of Justice Canada 2023)

Janji hanya dinarasikan saat akan menjalani pemilihan, ketika sudah terpilih banyak pemimpin yang seakan lupa dan menunda isu adat ini dengan alasan tidak cukup anggaran. Jika Kanada berani mengakui kesalahannya, maka kemungkinan besar mereka akan mendapatkan tekanan baru dari internasional untuk mengganti rugi segala biaya kepada masyarakat adat baik dalam bentuk uang, tanah atau kekuasaan. Ada resistensi serta diskriminasi struktural, sehingga akan sulit jika tidak dimulai dari akar rumput.

5. Analisis Dari English School Theory

English School Theory sering disebut sebagai Mazhab Inggris, paradigma yang mengintegrasikan pandangan realisme dan idealisme. Mazhab ini terpecah menjadi aliran pluralisme dan idealisme. Pluralisme berorientasi pada *international order* bukan *international justice* sedangkan idealisme sebaliknya. Robert Jackson menjelaskan konsep *global covenant* dalam bukunya *Human Conduct in a World State*, bahwa hubungan internasional berlangsung horizontal, inklusif berdasarkan kedaulatan, penentuan nasib sendiri dan nonintervensi. Pluralisme memandang masyarakat internasional sebagai perluasan domestik bukan transformasi, melainkan bagaimana nilai universal diperjuangkan melalui

campur tangan. Pemerintah Kanada ingin bekerja sesuai administrasi dan hukum domestik, proses mereka lambat tapi pasti, jadi intervensi akan mereka tolak karena negara sudah bertindak. *Amnesty* memandang kelambatan birokrasi berarti pelanggaran struktural terus terjadi, intervensi sah dan akan berhenti ketika korban sudah bebas dari kejahatan HAM. (Buzan 2014)

Dalam pelanggaran HAM *First Nation*, Pemerintah Kanada menganut aliran pluralisme sedangkan *Amnesty International* menganut solidarisme. Sejak 2015, Pemerintah Kanada menunjukkan alokasi dana yang terbatas yaitu lebih dari 3 miliar CA\$ mengakibatkan dana gaji operator dan pemeliharaan kurang sehingga proses rekonsiliasi baru tidak bisa tercapai dalam waktu dekat, sesuai dengan pluralisme, pemerintah merasa mereka berhak untuk menentukan tempo dan lebih mengenal dinamika adat *First Nation* karena itu masuk ke otonomi Kanada, mereka ingin urusan domestik ini diselesaikan secara internal. Pemerintah Kanada berhasil mengembalikan kompensasi pengobatan trauma sekolah paksa dan perbaikan peringatan air jangka panjang serta pendanaan riset dampak lingkungan di Fort Chipewyan sebagai tanggapan pengaduan tambang minyak.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa akar konflik dapat dilihat menggunakan *English School Theory* yaitu perbedaan *framing* antar aktor *state* dan *non-state*, melalui pendekatan pluralis Pemerintah Kanada memandang isu *First Nation* sebagai masalah internal kedaulatan nasional yang berdasarkan prinsip *non-intervention* sedangkan *Amnesty International* melalui pendekatan solidaris memandang isu ini telah melanggar prinsip yang diatur dalam UNDRIP, ICCPR dan ICESCR. Tantangannya yaitu secara teori HAM itu universal, sedangkan secara prakteknya, terdapat perbedaan interpretasi karena setiap negara memiliki isu HAM yang berbeda. Meskipun begitu, semua pasti sepakat kalau HAM diperjuangkan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Hasil riset *Amnesty International* dipublikasikan dengan bantuan organisasi internasional lain seperti PBB, *output*-nya mereka berhasil membentuk *public opinion* dan mendesak Pemerintah Kanada untuk implementasi UNDRIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. 2013. "Royal Proclamation of 1763: Relationships, Rights and Treaties."
- Amnesty International. 2024. "Indigenous Peoples' Rights." Accessed June 1, 2025. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/>.
- Buzan, Barry. 2014. *An Introduction to the English School of International Relations*. VI-IX vols. Cambridge: Polity.
- Department of Justice Canada. 2023. "Implementing United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act: Next phase of co-development." *canada.ca*.
- Global News Canada. 2021. "How colonial systems have left some First."
- Mitchell, Matthew I, and Davis Yuzdepski. 2019. "Indigenous peoples, UNDRIP and land conflict: an African perspective." *The International Journal of Human Rights*. doi:10.1080/13642987.2019.1612374.
- Nagy, Rosemary. 2017. "Can Reconciliation Be Compelled? Transnational Advocacy and the Indigenous-Canada Relationship." *Peace and Change*. doi:10.1111/pech.12243.

- Safe Drinking Water Foundation. 2019. *Water in First Nations Ceremonies*. sdwf.org. Accessed June 24, 2025. <https://www.safewater.org/operation-water-spirit-1/2019/4/13/grades10-12-lesson-1-water-in-first-nations-ceremonies>.
- The Canadian Encyclopedia. 2023. *First Nations in Canada*.
- The Feminist Northern Network. 2016. "Colonialism and Its Impact." *Canadian Research Institute for the Advancement of Women*.
- Tockman, Jason. 2018. "Eliding consent in extractivist states: Bolivia, Canada, and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples." *The International Journal of Human Rights*. doi:10.1080/13642987.2017.1383241.
- Winfield, Mark. 2014. "Six Functions of Non-Governmental Organizations in a Democratic Society." Accessed June 13, 2025. <https://marksw.blog.yorku.ca/2014/02/11/five-functions-of-nongovernmental-organizations-in-a-democratic-society/>).